



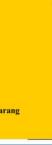




Tour to de PRAMBANAN

Tim Redaksi

- Pengarah
- : Cris Kuntadi
- · Penanggung Jawab : Yavat Rahadiyat Pemimpin Redaksi : Supriyonohadi
- Tim Jurnalis
- Risa Trihastuti
- Rina Ulina Br Gurusinga
- Yusanti
- Diah Aryani Septarina K.
- Design Grafis : Nusabela Fotografer : Purwanto
- Alamat Redaksi Telp/Fax
- : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175, Semarang
- Email
- : (024) 8660825, 8660826 / (024) 8660884 : humasbpk smg@yahoo.co.id











Edisi Desember 2014

RAKERDA BPK RI

Para pejabat eselon III BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memaparkan evaluasi kinerja tahun 2014 dan rencana tahun 2015 pada masing-masing unit kerjanya. Hal ini disampaikan dalam acara rapat kerja daerah (rakerda) Perwakilan Jawa Tengah yang digelar pada tanggal 11-12 Desember 2014. Acara diikuti oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa pencapaian dan permasalahan di Perwakilan Jawa Tengah lebih lanjut dibahas dalam lima kelompok. Kelompok pertama dengan Ketua Kasubbag Hukum membahas tema isu pada pemeriksaan LKPD dan PDTT (Belanja dan Pendapatan). Beberapa permasalahan yang dibahas antara lain: (1) kriteria dan komposisi anggota tim reviu; (2) keseragaman pendapat atas format laporan LKPD, pengembalian kerugian daerah sebelum LHP terbit, kriteria pengambilan keputusan oleh tim reviu, kriteria penetapan opini, pemeriksaan belanja infrastruktur, format laporan PDTT, serta survey hot review LKPD oleh para auditor.

Kelompok kedua dengan Ketua Kasubbag TU Kalan membahas tema isu pada pemeriksaan BUMD/BLUD, audit tematik, audit kineria dan usulan bahan pendapat. Beberapa permasalahan yang dibahas yaitu: (1) kriteria BUMD/BLUD yang dapat dan akan diperiksa LK Tahun 2015; (2) Diklat audit kinerja; (3) usulan materi bahan pendapat; (4) rencana audit kinerja tematik Perwakilan; serta (5) strategi revisi RKP.

Kelompok ketiga dengan Ketua Kasubbag Umum membahas tema isu sarana dan prasarana untuk kantor dan keperluan pemeriksaan dengan permasalahan: (1) perlengkapan pendukung pemeriksaan; (2) rencana pengadaan sarpras 2015; (3) penyusunan rencana family gathering, outbond dan rencana kerja daerah 2015; serta (4) strategi penataan aset perwakilan.

Kelompok keempat dengan Ketua Kasubbag SDM membahas tema isu SDM, angka kredit dan diklat. Permasalahan yang dibahas yaitu: (1) penyediaan tenaga pemeriksa dalam LKPD/PDTT/Kinerja tahun 2015; (2) pengembangan profesi auditor; (3) strategi peningkatan angka kredit; (4) usulan diklat 2015; serta (5) strategi penilaian angka kredit.

Kelompok kelima dengan Ketua Kasubbag Keuangan dengan tema isu keuangan untuk penunjang pemeriksaan. Permasalahan yang

dibahas antara lain: (1) solusi penyelesaian SPJ yang tepat dan akurat; (2) menyusun SOP pemrosesan biaya pemeriksaan; (3) sosialisasi SOP; (4) solusi penyerapan anggaran; serta (5) SOP penggunaan tenaga ahli dan laboratorium.

Hasil pembahasan masing-masing kelompok dipaparkan pada hari kedua untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari semua pihak. Kepala Perwakilan, Cris Kuntadi berharap rakerda Perwakilan Jawa Tengah ini dapat menumbuhkan kesamaan tindak, kesamaan pemahaman serta kesamaan solusi atas permasalahan yang dihadapi selama ini. Diingatkan juga agar seluruh pegawai dapat memegang teguh nilai-nilai dasar BPK, yaitu independensi integritas dan profesionalisme (IIP) yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai dalam setiap aspek pekerjaan



Daftar Isi

Rakerda BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1
Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK	. 2 dan 3
Tuntutan Baru di Komisi Informasi	2 dan 3
Congratulation	3
Galeri Foto Perwakilan	4

Segera Tindaklanjuti REKOMENDASI BPK

Semarang, 10 Desember 2014 – Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Desember 2014.

Kepala Perwakilan, Cris Kuntadi saat membuka acara pada Senin 8 Desember 2014 menyampaikan bahwa menurut hasil pemantauan dan pembahasan TLRHP periode tahun 2005-Semester I 2014 dari sebanyak 15.685 Rekomendasi senilai Rp 712,6 miliar

Tengah melaksanakan Pemantauan dan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahum 2014. Acara ini berlangsung selama tiga hari yaitu tanggal 8 sampai 10

> Telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 12.097 rekomendasi senilai Rp411,2 miliar atau 57,7% 2. ☑Belum sesuai rekomendasi sebanyak 3.150. rekomendasi senilai Rp285,5 miliar atau 40,1%.

☑Belum ditindaklanjuti sebanyak 433 rekomendasi senilai Rp15,9 miliar atau 2,2%;

> ☑Tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan yang sah sebanyak 5 rekomendasi tanpa nilai telah mendapatkan persetujuan Anggota V.

> > Trend Jumlah Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti mengalami peningkatan dalam tiap semester yaitu antara 5%-10%, walaupun rekomendasi BPK tiap semester

bertambah. Hal ini dapat ditunjukkan dalam data pemantauan dari semester II 2012 s.d Semester II 2013 yaitu dari per Semester II 2012 yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 9.029 rekomendasi meningkat menjadi 10.968 rekomendasi pada per Semester II 2013 seiring dengan bertambahnya rekomendasi BPK dari 12.220 rekomendasi pada per semester II 2012 menjadi 14.363 rekomendasi per

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono menyampaikan dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini sangat tepat untuk meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas keuangan khususnya di Provinsi Jawa Tengah serta mengefektifkan system pengendalian instern untuk meningkatkan kepatuhan atas pengelolaan keuangan daerah. Sekda Provinsi Jawa Tengah mengingatkan himbauan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan Good Government dan Clean Governance dengan jargon "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi" harus segera diwujudkan bersama. Selain itu diharapkan pada tahun 2015 mendatang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat meningkat. Diharapkan keseriusan untuk dapat menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dengan segera. Apabila tidak kunjung selesai, maka bisa jadi permasalahan tersebut akan digulirkan ke ranah hukum. Masalah administrasi harus segera diselesaikan karena regulasi dari Pemerintah Pusat telah mengatur agar tindak lanjut harus diselesaikan sesegera mungkin.

Dalam kesempatan ini hadir pula Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah, Bambang Wahyudi. Disampaikan bahwa Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus menguasai tiga C: (1) current regulation, vaitu menguasai peraturan-peraturan yang update untuk memahami peraturan yang sebenarnya dan nantinya disampaikan kepada SKPD di daerah; (2) current issue, yaitu segera menindaklanjuti permasalahan yang ada bersama pimpinan daerah dan mengatur koordinasi dengan instansi terkait agar permasalahan tidak berkembang: serta (3) cek and balance, yaitu apabila terdapat temuan dari pihak eksternal maka APIP dapat melakukan cek and balance dan memberitahukan kepada dinas-dinas terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan tersebut.

Dihadirkan pula Edy Santoso, motivator dari Eagle Spirit Indonesia dengan jargon "Break Your Limit!". Program motivasi ini dirancang khusus untuk membangkitkan segala potensi positif dalam diri setiap peserta, sekaligus menghancurkan segala rintangan, hambatan, keyakinan-keyakinan negatif (disempowering/Limiting Belif) yang selama ini membelenggu diri dan menjadi halangan (mental block). Hal ini disimulasikan pada akhir sesi motivasi ini dengan mematahkan pensil yang menjadi simbol kelemahan diri.

Selepas rangkaian pembukaan, acara dilanjutkan dengan pemantauan dan pembahasan TLRHP pada masing-masing subauditorat. Acara yang dilaksanakan selama tiga ini ditutup pada Rabu, 10 Desember 2014.

Tuntutan Baru INFORMASI di KOMISI INFORMASI

Selasa, 16 Desember 2014 LSM Pergerakan MATA UMAT kembali melayangkan tuntuan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan nomor Register No. 0083/SI/VII/2014. Sidang perdana dilaksanakan di kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tanpa dihadiri Pemohon.

Majelis Komisioner yang menangani gugatan informasi pada hari ini ini diketuai Zainal Abidin, S.H., M.H. dengan komisioner anggota Handoko Agung, S. Sos. dan Nur Fuad, S. Ag., Majelis membacakan ringkasan permohonan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak menyediakan informasi berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta tata cara pengaduan masyarakat di situs resmi dan papan pengumuman kantor BPK. Pemohon telah menyampaikan surat permohonan informasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 April 2014.

Termohon melalui kuasa termohon, menyampaikan 2 hal, yaitu: (a) permohonan yang tidak prosedural karena pada hari yang sama Pemohon juga menyampaikan pernyataan keberatan kepada BPK karena tidak menyediakan data/informasi dimaksud; (b) secara substansi informasi yang diminta sudah dapat di akses pada situs BPK oleh siapapun dan dimanapun serta telah dapat diakses sebelum Pemohon mengajukan permohonan kepada BPK. Untuk informasi LHKPN dapat dilihat pada situs www.bpk.go.id. Sementara untuk prosedur pengaduan masyarakat dapat dilihat pada situs www.semarang.bpk.go.id.

Sesuai Peraturan Komisi Informasin nomor 1 Tahun 2013, jika Pemohon tidak memenuhi undangan yang telah disampaikan secara patut sebanyak 2 (dua) kali, maka permohonan akan dibatalkan. Sidang ditunda dan akan dilaksanakan kembali pada hari Selasa, 23 Desember 2014.

diajukan oleh Pemohon pada tanggal 7 April 2014

Congratulation Selamat merayakan Natal 25 Desember 2014 dan Tahun Baru 2015 Kiranya kasih-Nya memberi damai bagi kita